

MEMILIH PEMIMPIN BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM DALAM KONTEKS POLITIK INDONESIA TAHUN 2024

Indah Rahma Abdillah¹, Fretty Novelyna Ramadhani², Nur Aida Rahmasari³, Nia
Khairunnisa⁴, Saifuddin Zuhri⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

arahmaindah@gmail.com¹, fnovelyna06@gmail.com², rahmasarii1221@gmail.com³,
niakhairunnisa28@gmail.com⁴, saifuddin_zuhri.ilkom@upnjatim.ac.id⁵

Abstract: *In the Islamic view, the election of leaders is a mandate that requires serious consideration of integrity, justice, and religious values. However, general elections in Indonesia are often faced with the problem of selecting unethical leadership candidates. The political and legal system in Indonesia sometimes facilitates the nomination of individuals with poor records, making it difficult to apply Islamic principles in plural and democratic politics. A qualitative approach was used to examine primary and secondary sources related to Islamic views on leadership, as well as exploring challenges in applying Islamic principles in general elections in Indonesia. This study provides insight into how integrity and religious values can be integrated into the leader selection process, with the aim of creating a more just and ethical political system.*

Keywords: *Leader, Islam, Indonesian Politics.*

Abstrak: Dalam pandangan Islam, pemilihan pemimpin merupakan amanah yang memerlukan pertimbangan serius terhadap integritas, keadilan, dan nilai-nilai agama. Namun, pemilihan umum di Indonesia sering kali dihadapkan pada permasalahan pemilihan calon pemimpin yang tidak beretika. Sistem politik dan hukum di Indonesia kadang-kadang memfasilitasi pencalonan individu-individu dengan catatan buruk, sehingga prinsip-prinsip Islam sulit diterapkan dalam politik yang plural dan demokratis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pandangan Islam mengenai kepemimpinan, serta mengeksplorasi tantangan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam pemilihan umum di Indonesia. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana integritas dan nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam proses pemilihan pemimpin, dengan tujuan menciptakan sistem politik yang lebih adil dan beretika.

Kata Kunci: Pemimpin, Islam, Politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya untuk menentukan atau memperjuangkan tujuan yang diinginkan. Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah merupakan dua istilah yang digunakan Alquran untuk merujuk pada pemimpin. Kata imam berasal dari kata amma-ya'ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang. Kata khalifah sering diartikan pengganti karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya. Pemimpin merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia (Zainuddin, 2024). Islam mengajarkan adanya dua pengertian yaitu imam dan pemimpin dan yang lebih diutamakan adalah sistem aturan, bukan persona (Suryawati & Syahputri, 2024).

Dalam pandangan islam, pemilihan pemimpin dianggap lebih dari sekedar proses politik yang terjadi rutin setiap 5 tahun sekali, melainkan suatu amanah yang menuntut pertimbangan serius terhadap integritas, keadilan, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai agama

(Aliano & Adon, 2023). Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan orientasi kepemimpinan pada pelayanan masyarakat menjadi dasar utama sebagai pandangan untuk menilai kesesuaian seorang calon pemimpin.

Selain itu, konsep syura (musyawarah) juga memiliki peran yang signifikan dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, penerapan konsep tersebut melalui pemilu. Dengan pemilu dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Sehingga, pemilihan pemimpin dalam Islam bukan semata-mata hak prerogatif seorang individu atau elit politik, melainkan merupakan proses partisipatif yang melibatkan seluruh kalangan (Srimadana & Caniogo, 2022).

Pemilihan calon pemimpin yang tidak beretika menjadi perhatian utama dan sering kali menimbulkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Isu ini berkaitan dengan bagaimana sistem politik dan hukum memfasilitasi, atau bahkan dalam beberapa kejadian, memberikan dukungan kepada pencalonan mereka. Sering kali masyarakat melihat tokoh politik yang terpilih dalam pemerintahan memiliki banyak catatan buruk dalam hal etika maupun moral (Rohman, 2021). Indonesia sendiri memiliki sistem khusus untuk menyelenggarakan pemilihan kepala negara, yang dikenal sebagai pemilihan umum, yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak untuk memilih. Pemilihan umum adalah proses yang diwajibkan (Askana Fikriana & M. Kahfi Rezki, 2023). Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi dan merupakan cara pemerintah memberikan suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin pemerintah (Wulandari, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman teoritis tentang kepemimpinan dalam Islam kepemimpinan dengan realitas praktis pemilihan umum di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pandangan Islam, serta melihat bagaimana pandangan ini dapat diaplikasikan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan-tantangan yang muncul ketika mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik yang plural dan demokratis seperti di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan memanfaatkan studi kepustakaan yang berfokus pada kajian hukum normatif. Dalam upaya pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, serta sumber-sumber keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadist. Proses pengumpulan data mencakup penelaahan mendalam terhadap literatur yang relevan dan bermakna dalam konteks hukum.

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisisnya menggunakan teknik analisis konseptual. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menghubungkan konsep-konsep kunci yang muncul dari berbagai sumber. Hasil analisis konseptual ini kemudian diintegrasikan dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan akhir dari penelitian. Dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kajian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam Islam, pemilihan pemimpin atau kepemimpinan tidak hanya sekadar masalah politik, tetapi juga memiliki dimensi etis dan moral yang sangat penting. Pemilihan pemimpin harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, yang mencakup kualitas kepemimpinan, integritas moral, dan kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Pertama-tama, proses pemilihan pemimpin dalam Islam harus

berlandaskan pada kualitas kepemimpinan calon pemimpin. Dalam Al-Qur'an dan hadis, ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang benar. Ini mengindikasikan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki integritas moral yang tinggi serta kemampuan untuk memimpin dengan tulus demi kebaikan umat.

Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin juga sangat penting dalam Islam. Prinsip syura (musyawarah) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam Islam menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Pemilihan pemimpin tidak boleh dilakukan secara otoriter atau dipaksakan, tetapi harus melibatkan musyawarah antara calon pemimpin dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan. Ketiga, kualitas moral dan integritas pribadi calon pemimpin harus menjadi fokus utama dalam proses pemilihan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga akhlak yang baik dan menghindari perilaku yang tidak bermoral. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki reputasi baik, jujur, dan amanah dalam menjalankan tugasnya harus diprioritaskan dalam pemilihan pemimpin.

Keempat, adil dan transparan dalam proses pemilihan pemimpin juga merupakan aspek penting dalam Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Proses pemilihan haruslah terbuka untuk semua pihak tanpa diskriminasi dan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif terhadap kualitas dan kapasitas calon pemimpin. Kelima, setelah terpilih, pemimpin harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Islam menekankan pentingnya pemimpin untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT dan juga kepada umatnya. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan umat dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Jika seorang pemimpin tidak memenuhi kewajibannya, maka umat memiliki hak untuk mengkritik dan mengoreksi kepemimpinannya secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

1. Pemimpin yang Amanah

Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjalankan amanah yang telah diberikan Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang berwenang dalam Islam. Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin yang dipilih haruslah mereka yang amanah terhadap prinsip-prinsip Islam dan memiliki otoritas yang diakui oleh masyarakat. Ketika terdapat perbedaan pendapat dalam pemilihan pemimpin, masyarakat diimbau untuk mencari solusi melalui musyawarah dan merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh agama dan ajaran-Nya (Srimadona & Caniago, 2022).

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, pemilihan pemimpin yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas, keadilan, dan kebijaksanaan dalam memimpin negara. Selain itu, pemimpin yang terpilih diharapkan juga dapat menjalankan amanahnya dengan bertanggung jawab penuh kepada Allah SWT dan masyarakat.

2. Pemimpin yang Musyawarah

Ayat Al-Qur'an Surah Asy-Syura (42): Ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,"

Ayat ini menegaskan beberapa prinsip dalam Islam yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin (Rohman, 2021). Pertama, ayat ini menekankan pentingnya menjawab seruan Tuhan dengan iman dan ketaatan kepada-Nya, yang mencakup menjalankan ibadah shalat. Kedua, ayat tersebut menyebutkan dengan demikian urusan mereka (umat) adalah dengan adanya musyawarah antara mereka. Hal itu menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pemimpin.

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, ayat ini menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan musyawarah dalam proses demokrasi. Musyawarah yang dilakukan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan kebersamaan dapat menjadi landasan dalam menentukan pemimpin yang terbaik bagi negara. Dalam musyawarah, pendapat setiap individu atau kelompok dihargai dan dipertimbangkan secara adil.

Selain itu, ayat tersebut juga akan menekankan pentingnya pengeluaran yang bermanfaat dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dalam konteks pemilihan pemimpin, pengeluaran yang bermanfaat dapat mencakup dukungan yang diberikan kepada calon pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Ayat ini mengajarkan bahwa pemilihan pemimpin harus dilakukan melalui proses musyawarah yang adil dan bertanggung jawab, serta didukung oleh pengeluaran yang bermanfaat dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat membawa kemajuan bagi negara dan masyarakatnya.

3. Pemimpin yang Adil

Abu Hurairah RA menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya: "Ada tujuh orang yang dinaungi Allah dengan naungan-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya terpaut di masjid-masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah pun karena-Nya pula, dan seorang laki-laki yang diminta berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, tetapi ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah', seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang berdzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu matanya mengucurkan (air mata)." (HR Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin yang dirindukan oleh Allah SWT adalah sosok yang selalu berusaha menegakkan keadilan selama hidupnya. Untuk mencapai derajat ini, seorang pemimpin harus menyadari bahwa segala yang ia terima, mulai dari gaji hingga fasilitas kerja, merupakan amanah dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, semua fasilitas dan sumber daya tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Sebaliknya, seorang pemimpin yang menyalahgunakan kenikmatan yang diberikan oleh rakyatnya untuk memenuhi ketamakan pribadi sangat jauh dari sifat yang diridhai oleh Allah SWT. Pemimpin seperti ini mudah terjerumus oleh bujuk rayu setan ke jalan yang sesat. Jika seorang pemimpin berperilaku demikian, ia akan termasuk golongan yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis tersebut.

Maka dari itu, menjadi seorang pemimpin yang adil adalah tugas yang sangat berat dan menantang. Rasulullah SAW menyebutkan pemimpin yang adil pertama kali dalam hadist ini sebagai tanda betapa mulianya kedudukan pemimpin yang menegakkan keadilan. Pemimpin yang adil tidak hanya dicintai rakyatnya, tetapi juga dirindukan oleh Allah SWT. Amanah besar ini menuntut kesadaran tinggi, integritas, dan komitmen kuat untuk selalu mengutamakan keadilan di atas segala kepentingan pribadi.

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, hadis ini menyoroti pentingnya memilih pemimpin yang adil, berintegritas, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang dipilih harus mampu memperjuangkan kepentingan umat dan negara dengan adil serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, pemilihan pemimpin di Indonesia 2024 harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab, dengan memilih pemimpin yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh agama Islam dan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.

4. Pemimpin yang Taat

Ayat Al-Qur'an Surah Sad (38): Ayat 26 sebagai berikut:

وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

Artinya: "Dan Kami tundukkan baginya angin yang bertiup lembut karena perintahnya (mengikuti perintahnya), mengarah ke tempat yang dikehendakinya."

Ayat ini menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT dalam mengendalikan alam semesta, termasuk angin yang diperintahkan untuk bertiup lembut dan mengarah sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah SWT memiliki kendali penuh atas segala sesuatu dan segala yang ada di dunia ini tunduk pada perintah-Nya. Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, ayat ini mengandung pesan bahwa pemimpin yang dipilih oleh masyarakat haruslah mereka pilih dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kehendak Allah. Sebagaimana angin yang tunduk pada perintah-Nya, demikian pula pemimpin haruslah tunduk pada ketentuan agama dan menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah (Panggabean & Harahap, 2024).

Pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keimanan kepada Allah akan menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus memilih pemimpin yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada nilai-nilai agama Islam agar negara dapat berkembang sesuai dengan ridha Allah SWT.

5. Pemimpin yang Lemah Lembut

Ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran (3): Ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal."

Ayat tersebut menegaskan betapa penting sikap lemah lembut, pemaaf, dan bermusyawarah dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Allah SWT mengajarkan kepada umat-Nya agar bersikap lemah lembut dan pemaaf terhadap sesama, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun (Rohman, 2021). Sikap ini merupakan bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, ayat ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin, mereka harus bersikap lemah lembut dan pemaaf terhadap calon pemimpin yang

mungkin memiliki kekurangan atau kesalahan. Musyawarah juga ditekankan sebagai cara yang baik untuk mencapai kesepakatan dalam memilih pemimpin yang terbaik bagi negara.

Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kepada umat Islam untuk bertawakal kepada Allah SWT setelah membulatkan tekad. Ini mengandung makna bahwa setelah memilih pemimpin yang dianggap terbaik, masyarakat harus percaya sepenuhnya kepada Allah SWT bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik bagi negara, dan Allah SWT akan memberikan pertolongan-Nya kepada mereka yang bertawakal (Srimadana & Caniago, 2022). Ayat ini memberikan panduan bagi masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin di Indonesia 2024, yaitu dengan sikap lemah lembut, pemaaf, dan musyawarah, serta bertawakal kepada Allah SWT setelah membulatkan tekad dalam memilih. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan membawa kemajuan dan keberkahan bagi negara dan masyarakatnya (Fitriyani et al., 2024).

Penerapan teori Islam dalam memilih pemimpin, terutama dalam politik Indonesia saat ini, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam menekankan pada keadilan, integritas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam Al-Qur'an dan hadis, pemimpin diinstruksikan untuk memimpin dengan adil dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemilihan pemimpin di Indonesia dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh rakyat. Islam mengajarkan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan. Konsep musyawarah atau syura adalah salah satu nilai yang ditekankan dalam Islam. Dalam konteks pemilihan pemimpin, konsultasi dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, tokoh agama, dan cendekiawan, menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan mewakili kepentingan seluruh umat.

Islam juga menekankan pada aspek moral dan etika dalam kepemimpinan. Pemimpin yang dipilih seharusnya memiliki karakter yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip moral ini mencakup hal-hal seperti amanah, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam pemilihan pemimpin, Indonesia dapat menghindari terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali menjadi masalah dalam politik. Penerapan teori Islam dalam memilih pemimpin juga dapat memperkuat kedaulatan dan identitas bangsa. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Pemimpin yang dipilih dengan memperhatikan nilai-nilai Islam juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat, karena dianggap mewakili nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas penduduk. Penerapan teori Islam dalam memilih pemimpin dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Islam mengajarkan untuk peduli terhadap kepentingan umum dan memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan (Panggabean & Harahap, 2024). Dengan memilih pemimpin yang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi Islam, Indonesia dapat mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat sistem keadilan, dan menciptakan masyarakat yang lebih makmur dan berkeadilan bagi semua warganya.

Pemilu 2024 di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam proses demokrasi negara ini, dengan berbagai aspek yang memengaruhi jalannya. Dalam konteks prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, pemimpin haruslah beriman dan bertakwa, memiliki integritas yang tinggi, serta memperjuangkan kepentingan umat. Dalam hal ini, pentingnya memilih pemimpin yang memenuhi kriteria agama seperti yang disampaikan dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009 menjadi poin utama. Namun, apakah figur-figur politik yang muncul dalam konteks Pemilu 2024 memenuhi standar ini adalah subjek perdebatan.

Isu politik dinasti yang menjadi sorotan juga relevan dalam konteks prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan nilai-nilai penting dalam proses pemilihan pemimpin. Kehadiran figur-figur politik yang terkait erat dengan dinasti politik, seperti yang terjadi dengan beberapa kandidat dalam Pemilu 2024, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan akuntabilitas dalam demokrasi. Aspek partisipasi aktif masyarakat juga merupakan nilai yang penting dalam Islam. Dalam konteks ini, pentingnya menjalankan pemilihan secara bebas, jujur, dan adil sesuai dengan seruan MUI menjadi hal yang ditekankan. Namun, bagaimana proses tersebut dijalankan di tengah realitas politik dan sosial Indonesia yang kompleks menjadi pertanyaan yang memerlukan evaluasi mendalam.

Profesionalitas dan independensi lembaga-lembaga terkait pemilihan, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, juga relevan dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan proses demokrasi sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan independensi menjadi kunci dalam menjamin integritas pemilihan pemimpin (Fitriyani et al., 2024). Dalam media massa dan penyebaran informasi, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan ketidakberpihakan menjadi nilai yang penting dalam Islam. Seruan MUI kepada media untuk bersikap netral dan proaktif dalam menyampaikan informasi, serta masyarakat untuk menjadi cerdas dan kritis dalam menyikapi informasi yang diterima, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan (Zainuddin, 2024).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia, dan bagi seorang Muslim, memahami pentingnya Pemilu adalah tanggung jawab yang harus diemban. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Shad (38) ayat 22 (Khoiruddin et al., 2023). Pemilihan Umum dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat, mempertahankan demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili seluruh masyarakat (Sani, 2023). Pemilu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umat. Pentingnya integritas dalam menjalankan Pemilu juga ditekankan dalam Islam (Aliano & Adon, 2023). Muslim diarahkan untuk tidak terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, seperti politik uang atau penyebaran berita bohong. Prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam Pemilu sejalan dengan ajaran Islam, seperti yang disampaikan dalam QS. Ali Imran ayat 26. Kesadaran politik yang kuat juga penting bagi seorang Muslim (Srimadona & Caniago, 2022). Ini mencakup pemahaman isu-isu politik, mempelajari visi dan program calon pemimpin, serta mengikuti perkembangan politik secara aktif. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang bijaksana saat memilih pemimpin, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang sehat juga didorong dalam Islam. Menjaga adab dalam berdiskusi, menghormati perbedaan pendapat, dan mengutamakan fakta dapat membantu memperdalam pemahaman tentang isu-isu politik yang kompleks. QS. Al-Ankabut ayat 46 menekankan pentingnya berdebat dengan cara yang baik. Terakhir, setelah Pemilu selesai, penting bagi seorang Muslim untuk menghormati keputusan bersama dan bekerja sama dengan pemimpin yang terpilih untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

B. Pembahasan

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan utama tidak hanya karena ukurannya yang monumental sebagai salah satu pemilihan umum terbesar di dunia, tetapi juga karena berbagai dinamika yang memengaruhi jalannya. Dalam hal ini, penting untuk menguraikan beberapa aspek kunci yang menandai proses pemilu tersebut. Pertama, adalah dominasi pemilih muda dalam proses pemilu tersebut (Panggabean & Harahap, 2024), dengan persentase pemilih usia

22-30 tahun mencapai 56%, generasi muda memegang peran penting dalam menentukan arah politik negara ini. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami aspirasi dan kebutuhan generasi muda dalam merumuskan kebijakan politik dan pembangunan di masa mendatang.

Kedua, isu politik dinasti yang menjadi perbincangan hangat dalam konteks Pemilu 2024. Kehadiran figur-figur politik yang terkait erat dengan dinasti politik, seperti Gibran Rakabuming Raka, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam konteks demokrasi. Dengan menggunakan ambang batas 25 persen dari suara sah nasional, Pemilu 2024 akan serupa dengan Pemilu 2014 dan 2019. Ini berarti bahwa partai-partai yang menggunakan hasil Pemilu 2019 untuk membangun koalisi taktis sebelum Pemilu Presiden 2024 (Cahyono et al., 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran untuk bertarung dalam Pilpres juga memunculkan kritik terhadap potensi perluasan politik dinasti di Indonesia. Ketiga, potensi polarisasi dan penyebaran misinformasi di media sosial menjadi tantangan serius yang dihadapi dalam pemilu ini. Dengan pesatnya penetrasi media sosial dalam masyarakat, informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan disinformasi dapat dengan mudah menyebar, mempengaruhi persepsi publik, dan memicu polarisasi politik yang lebih besar (Fitriyani et al., 2024).

Keempat, struktur dan dinamika koalisi politik menjadi faktor penting dalam memahami dinamika Pemilu 2024. Dengan terbentuknya tiga koalisi besar yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, persaingan politik menjadi semakin kompleks dan menantang. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilihan presiden, tetapi juga menentukan arah kebijakan dan stabilitas politik pasca-pemilu. Kelima, jadwal tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan serangkaian proses yang harus dilalui dalam menjalankan pemilu yang demokratis dan teratur. Mulai dari penetapan pasangan calon presiden hingga tahapan kampanye dan pemungutan suara, setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjamin integritas dan legitimasi proses pemilu.

Pemilu 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi ajang politik untuk menentukan pemimpin baru, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dalam demokrasi negara ini. Dengan memahami dan mengurai berbagai aspek yang memengaruhi pemilu tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam menjaga proses demokratis dan memastikan terwujudnya pemilihan yang adil dan berkualitas. Semua masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam negara demokrasi memiliki hak untuk memilih. Meskipun kewajiban mudah diucapkan, faktanya dan penerapannya sangat sulit. Satu hal yang harus dilakukan adalah memiliki kewajiban untuk dilakukan. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kemampuan untuk memimpin, bertanggung jawab untuk melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan (Sarkawi & Ahmad, 2022).

Pemilu 2024 di Indonesia diwarnai oleh serangkaian masalah yang mendalam, seperti politik identitas adalah politik yang menggunakan istilah identitas untuk menyatukan orang dalam kelompok atau komunitas berdasarkan ras, gender, entitas, keagamaan, persamaan, atau ketidakadilan (Romli & Nurlia, 2023). Serta adanya legitimasi etik-moral yang lemah hingga praktik politik uang yang merajalela. Fenomena ini menunjukkan lubang hitam dalam sistem demokrasi yang harus segera ditangani untuk menjaga integritas proses politik. Dari perspektif keagamaan, Pemilu 2024 menjadi cerminan dari pragmatisme dan kapitalisme dalam konteks politik, sementara nilai-nilai agama tampak terpinggirkan. Meskipun Indonesia sering mengklaim diri sebagai negara yang religius, sulit untuk menemukan keterwakilan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemilu yang diwarnai oleh deprivasi dan anomali politik. Vali Nasr pada awal milenium meramalkan kemunculan demokrasi berbasis agama, tetapi prediksinya tidak terwujud. Meskipun demikian, fenomena tersebut belum muncul hingga saat ini. Sebaliknya, terjadi dekonsolidasi demokrasi secara global, termasuk di Indonesia, yang ditandai oleh meningkatnya politik klientelisme, populisme, dan oligarki politik.

Meskipun gerakan masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat konsolidasi demokrasi, namun mereka cenderung terjebak dalam politik kartel dan kendali politik oligarki. Gerakan masyarakat sipil, terutama yang berbasis agama, belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, lebih rendah ketimbang politisi Muslim dalam hal ini. Dekonsolidasi demokrasi yang terjadi menunjukkan bahwa prioritas bangsa ini lebih tertuju pada dimensi ekonomi-politik, tanpa ruang bagi eksperimen atau penguatan nilai-nilai agama dalam konteks demokrasi. Gerakan Revolusi Mental yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sepuluh tahun lalu memunculkan harapan akan transformasi nilai-nilai dalam politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun, meskipun konsep tersebut sejalan dengan prediksi tentang demokrasi berbasis agama, yang mengadvokasi tata kelola yang bersih dan berintegritas, realisasi gerakan ini terhalang oleh dominasi pembangunan infrastruktur fisik

Pembangunan infrastruktur fisik yang mengesampingkan pembangunan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas, menjadi persoalan mendasar dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Isu-isu struktural seperti korupsi, politik uang, dan ketimpangan sosial menjadi tantangan serius yang harus diatasi untuk memperkuat fondasi demokrasi (Aliano & Adon, 2023).

Dalam Mukernas III Majelis Ulama Indonesia (MUI), delapan butir taujihat terkait Pemilu 2024 telah disahkan sebagai seruan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan perdamaian dalam proses demokrasi. Pertama, MUI menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan sebagai bangsa, menghindari politik golongan, sambil menjaga hubungan Islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah. Kedua, MUI mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan menjalankan pemilihan secara bebas, jujur, dan adil, serta menolak praktik politik transaksional dan korupsi suara. Ketiga, MUI mengingatkan umat Islam tentang kewajiban memilih pemimpin yang beriman, jujur, dan mampu memperjuangkan kepentingan umat serta prinsip amar makruf nahi munkar. Keempat, MUI menekankan pentingnya lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bekerja secara profesional dan independen demi menjamin integritas dan kualitas Pemilu (Zainuddin, 2024).

Kelima, MUI mengimbau Aparatur Negara untuk menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka, dari ASN hingga Kepala Desa, untuk memastikan Pemilu berjalan dengan adil. Keenam, MUI menyerukan kepada pengurus MUI yang terlibat dalam politik praktis untuk menjadi contoh dalam menerapkan politik yang berakhlak mulia, tanpa politik uang atau kecurangan. Ketujuh, MUI mengingatkan bahwa pemimpin masa depan harus mengutamakan etika, integritas, dan kepatuhan pada hukum dalam kepemimpinannya (Fitriyani et al., 2024). Terakhir, MUI menyerukan kepada media massa untuk bersikap netral dan proaktif dalam menyampaikan informasi, sehingga masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, serta terhindar dari berita palsu dan ujaran kebencian. Dengan demikian, seruan MUI ini bertujuan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan damai bagi kepentingan bersama bangsa Indonesia (Panggabean & Harahap, 2024).

KESIMPULAN

Dalam Islam, pemilihan pemimpin bukan hanya masalah politik, tetapi juga memiliki dimensi etis dan moral. Pemilihan pemimpin harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam, yang meliputi kualitas kepemimpinan, integritas moral, dan kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Proses pemilihan harus berlandaskan pada kualitas kepemimpinan calon, dengan menekankan sifat-sifat seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang benar. Transparansi dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah juga penting, sebagaimana diajarkan dalam prinsip syura, yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Selain itu, kualitas moral dan integritas pribadi calon pemimpin harus menjadi fokus utama, memastikan bahwa pemimpin yang dipilih memiliki reputasi baik, jujur, dan amanah. Proses

pemilihan harus adil dan transparan, terbuka untuk semua pihak tanpa diskriminasi, dan didasarkan pada pertimbangan obyektif terhadap kualitas dan kapasitas calon pemimpin. Setelah terpilih, pemimpin harus bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan umat dan berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia 2024, prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas, keadilan, dan kebijaksanaan, serta mampu menjalankan amanahnya dengan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Pemimpin yang amanah, adil, dan lemah lembut serta tunduk pada ketentuan agama diharapkan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi negara dan masyarakatnya, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 480–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/62767/27347>
- Askana Fikriana, & M. Kahfi Rezki. (2023). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>
- Cahyono, A., Iftitah, A., Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Fitriyani, A., Rosadi, A. D., Laila, F., Puspita, D., & Imron, A. (2024). Generasi Z Mempengaruhi Keputusan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Journal of Education Science (JES)*, 10(1), 14–24.
- Khoiruddin, H., Hasbiyallah, H., & Sulhan, M. (2023). Kajian Tematik Al-Quran Tentang Pemilihan Pemimpin. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02), 161–186. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4268>
- Mayapada, A. N., & Sastrawati, N. (2020). Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari'iyah*, 1(3), 422.
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>
- Rohman, A. (2021). Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(2), 139–152. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i2.78>
- Romli, O., & Nurlia, E. (2023). Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(November 2023), 26–38.
- Sani, A. (2023). Persepsi Mahasiswa tentang Kondisi Politik Indonesia Menjelang Pemilu 2024. *KALODRAN: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–12.
- Sarkawi, S., & Ahmad, F. (2022). Memilih Pemimpin dalam Islam. *Idarotuna*, 3(3), 198. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584>
- Srimadona, S., & Caniago, S. (2022). Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 237. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6821>
- Suryawati, N., & Syahputri, M. D. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Politik Para Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Warga Surabaya. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 92–104. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2107>
- Wulandari, C. D. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 11(1), 134. <https://doi.org/10.36080/ag.v11i1.2380>
- Zainuddin, T. (2024). Pendidikan Politik Islam melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Warga pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Sadida*, 4(1), 47–86. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/sadida/article/view/4179%0Ahttp://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/sadida/article/download/4179/1835>